

DAFTAR PENELITIAN DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2017

NO	JUDUL	PENELITI	KESIMPULAN	TAHUN
1	Kajian Syariat Islam Terhadap Tingkat Kriminalitas Pasca Penerapan Qanun Jinayah	Tim Peneliti Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry	<p>Dari data primer yang terkumpulkan mengindikasikan bahwa terjadi penurunan yang signifikan khusus pada delik-delik pidana jinayah. Penambahan jumlah delik pidana jinayah menjadi 10 (sepuluh) delik telah mempersempit ruang gerak tindakan criminal. Ada kecendrungan positif dari pemberlakuan pidana jinayah dan hukum acara jinayah menurunkan tindak criminal di Aceh khususnya di daerah perkotaan. Penurunan tingkat kriminalitas sebelum tahun-tahun penetapan Qanun jinayah. Penurunan tingkat kriminalitas tidak terlepas dari berbagai usaha dan penyuluhan yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang berada di bawah kordinasi pemerintah daerah Aceh.</p>	2017
2	Kajian Keseluruhan Syariat Islam Dalam Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	Tim Peneliti CeFALSAP	<p>Konsep agama dalam konsitusi Indonesia menganutkonsep satu Tuhan (<i>monoteis</i>). Dengan demikian secara konstitusional Indonesia secara tidak langsung mengambil asas-asas <i>Islamic values</i> (nilai-nilai keislaman), untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia.</p> <p>Dengan jelasnya konsep monotheis, dengan sendirinya Indonesia tidak bida dikategorikan Negara yang memisahkan konstitusi bernegara dan beragama, yang lebih dikenal dengan Negara sekuler (<i>secular state</i>). Konsep dasar Negara hukum Pancasila menandakan keseimbangan kehidupan bernegara (<i>balancing life of state</i>) yang diteguhkan oleh konstitusi. Meskipun para penyusun konstitusi (legal drafter menggunakan referensi dari Undang-Undang dasar dari banyak Negara, norma-norma dasar yang terdapat dalam konstitusi Indonesia tetap menekankan prinsip-prinsip <i>Bhineka tunggal ika</i> dan nilai-nilai regilius didalamnya.</p> <p>Dengan demikia, penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan mata rantai utuh dari norma-norma yang terdapat dalam konstitusi, seperti yang terdapat dalam Pembukaan (Preumble), pasal 28, dan Pasal 18B (1). Penerapan syariat Islam dalam sejumlah egulasi selama ini, merupakan perintah langsung dari sejumlahregulasi selama ini, merupakan perintah langsung dari sejumlah peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.</p> <p>Menyangkut tentang teori-teori keadilan syariat Islam ddengan hak Asasi manusia perlu dilihat</p>	2017

			<p>dari berbagai perspektif Teori keadilan yang berlaku pada umumnya menegaskan bahwa keadilan sudah dapat terwujud apabila sudah dijalankan suatu peraturan perundang-undangan. Disini terlihat bahwa standar menentukan keadilan apabila sudah ada proses peradilan, dimana para pihak yang berperka telah mengemukakan argument dan pembelaannya, lalu ada suatu putusan peradilan. Keadilan seperti ini bisa diasumsikan dengan keadilan positivistic, dimana tidak adanya ada keadilan sebelum noma keadilan itu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sedangkan sumber-sumber penerapan syariat Islam yang utama berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran bukan dari konstitusi suatu Negara. Setelah itu dikuatkan dengan hadis nabi yang bersifat <i>prophetic</i> (kenabian), lalu selanjutnya berkembang dalam tataran pemahaman berupa kajian fiqh. Perbedaan sumber dengan teori-teori keadilan yang berlaku umum, membuat perbedaan mendasar dalam teori keadilan dalam syariat Islam.</p> <p>Perbedaan tersebut salah satunya bisa dilihat dalam kajian pemindaan Islam, dimana para pelaku pembunuhan sengaja sekalipun bisa terhapus unsure pidananya, kalau sipelaku mendapat pemaafan dari keluarga korban, dengan disertai pembayaran sejumlah denda. Penghapusan unsure pidana bisa dikatakan adil dalam syariat Islam. Disini terlihat bahwa unsure-unsur penegakan hak asasi manusia lebih rinci lagi diatur dalam teori keadilan Islam. Dalam hal ini terindikasi ada upaya nyata untuk menyelamatkan hak asasi untuk hidup, khususnya bagi pelaku pembunuhan.</p>	
3	Strategi Dakwah Islamiyah di Aceh (Studi Deskriptif Kinerja Da'I Perbatasan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Kusmawati Hatta, MPd 2. Dr. Jasafar, MA 3. Dr. Juhari, M. Si 4. Drs. Baharuddin AR, M Si 5. Dr. Abizal M. Yati, Lc., MA 6. Syahril Furqany, MI Kom 	<p>Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan, maka dapat dinyatakan kesimpulan dari hasil penelitian, terkait kinerja Da'I Perbatasan dalam mengembagkan strategi dakwah Islamiyah di tiga wilayah Aceh, yaitu Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang secara umum sebelum dapat dikatakan berhasil baik dalam masyarakat. Pernyataan ini di dasari dari temuan penelitian bahwa</p> <p><i>Pertama</i> dilihat dari program dakwah yang dirumuskan Da'I perbatasan selama ini masih tidak bergerak dari rumusan yang di cantumkan dalam SK Pengangkatan Da'I dari Dinas Syariat Islam, yaitu : ceramah tentang pencegahan peredaran nakorba, busana muslimah, keyboard dan pergaulan bebas remaja, peningkatan pengamalan ajaran agama, pemberdayaan ekonomi. Itupun masih sebatas dakwah dengan metode ceramah dengan media pendukung adalah mimbar, sehingga secara keseluruhan kinerja da'I dalam hal ini masih dibawah standar yang diharapkan, walaupun masih ada yang memiliki inovasi dalam dakwahnya tetapi tidak signifikan</p>	

Kedua dilihat dari bentuk-bentuk pencapaian program dakwah yang sudah dilakukan Da'I perbatasan selama ini di tiga wilayah penelitian, juga belum dapat dikatakan berhasil baik. Hal ini dapat dilihat dari indicator capaian dakwah yang terdapat dalam peraturan gubernur, yaitu : (1) meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam secara menyeluruh; dalam item ini, secara umum sangat sulit untuk mengukur tentang tingkat pemahaman ajaran Islam dalam masyarakat, karena sejak awal, da'I perbatasan tidak melakukan free test dan juga posttest, tetapi hanya mengandalkan pada penglihatan perubahan perilaku, sehingga ketika da'I perbatasan juga mereka sulit untuk menjawab, (2) mengaktifkan shalat fardhu berjamaah; dalam item ini juga menurut temuan peneliti belum banyak masyarakat yang pergi shalat berjamaah, dengan alasan kalau shalat zuhur dan ashar mereka pergi bekerja, dan kalau magrib dan isya mereka kelelahan akibat bekerja, dan pada akhirnya tidak dapat mengikuti shalat berjamaah; (3) membina dan membimbing membaca Al-quran; item ini juga sulit mencapai target karena alasan geografis dan demografis; (4) membina TKA, TPA dan TQA; dalam item ini, Da'I perbatasan dapat dikatakan ada peningkatan, (5) membina umat dan mempererat ukhuwah; item ini sudah dilaksanakan oleh semua da'I perbatasan dan juga telah terjadi sedikit perubahan didalam hubungan sesama; (6) membimbing pengajian pembinaan remaja mesjid; mengisi pengajian dimajlis taklim, berperan aktif dalam pelaksanaan fardhu kifayah, keempat item ini secara keseluruhan sudah dilakukan oleh para da'I perbatasan, dan capaian hasilnya juga sedikit terjadi perubahan; (7) mengaktifkan kuliah subuh; item ini sulit dilakukan dengan alasan faktor geografis dan demografis' (8) memakmurkan mesjid; dalam Item ini, da'I perbatasan belum dapat bercerita banyak, karena sangat berkolerasi dengan fasilitas yang ada, SDM dan kedua ini sangat sulit dicari; (9) konsultasi dalam masalah keagamaan : praktek tahfiz mayit, kegiatan ini juga telah dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat sangat kurang. (10) membina kegiatan hari-hari besar Islam. kalam kegiatan ini, hampir semua da'I mencapai angka maksimal, karena setiap even hari besar Islam, partisipasi, tokoh masyarakat, aparatur desa dan Dinas turut berpartisipasi penuh.

Ketiga, dilihat dari upaya-upaya da'I perbatasan dalam penyelesaian kasus-kasus berkaitan dengan penguatan dan pengembangan Agama Islam di tiga wilayah penelitian menunjukkan belum maksimal, hal ini dapat dikatakan dari hasil wawancara dengan beberapa kapolsek yang bertugas mereka menyatakan bahwa jarang ada keikutsertaan da'I, karena ketidaktifan mereka dikarenakan persepsi yang berbeda terhadap peran dan fungsinya, maka selama ini jarang ikut serta.

			<i>Keempat, dilihat dari peluang dan tantangan da'I perbatasan dalam penguatan dan pengembangan agama Islam, ketiga wilayah penelitian tersebut sangat tinggi, sehingga memerlukan kreatifitas dan strategi yang jitu untuk dapat melewatinya.</i>	
--	--	--	--	--

Banda Aceh, 16 Oktober 2017

[Handwritten Signature] KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH *[Handwritten Signature]*



DR. Munawar, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19740925 199403 1 004

DAFTAR PENELITIAN DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2023

NO	JUDUL	PENELITI	KESIMPULAN	TAHUN
1	INDEKS PEMBANGUNAN SYARIAH ACEH	Dr. Muhammad Maulana, MA Dr. Mizaj Iskandar, MA Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M. Dr. Hafas Furqani, M.Ec Dr. Bismi Khalidin, M.Si Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E Muksal, S.E.I, M.E.I	<p>Berdasarkan hasil kajian Indeks Pembangunan Syariah (IPS), maka dapat diambil beberapa point kesimpulan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan IPS didasarkan atas 7 dimensi pembangunan yang terdiri dari Akhlak, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al-Quran, Manajemen Masjid, Hukum Jinayat, dan Akhlak. Hasil survey IPS Aceh secara gabungan berada dalam kondisi/kategori "baik" dengan nilai sebesar 81.84 poin 2. Hasil survei IPS Gabungan menetapkan Kabupaten Aceh Selatan sebagai daerah dengan nilai IPS tertinggi, dengan capaian sebesar 84,58 point. Sementara itu, Kota Sabang berada pada posisi capaian IPS terendah, dengan nilai sebesar 75,14 point. 3. Berdasarkan klasifikasi dimensi IPS maka dapat dijabarkan perolehan hasil sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dimensi aqidah memperoleh nilai indeks sebesar 92,13 point. Daerah tertinggi untuk dimensi aqidah adalah Kota Lhokseumawe sebesar 95,93 poin, sementara terendah berada di Kota Sabang sebesar 80,05 point. b. Dimensi Lembaga Keuangan Syariah memperoleh capaian indeks sebesar 79,75 point. Daerah tertinggi untuk dimensi Lembaga Keuangan Syariah adalah Kabupaten Nagan Raya sebesar 86,23 point, sementara terendah berada di Kabupaten Bener Meriah sebesar 68,37 point. c. Dimensi Kepatuhan Membayar Zakat memperoleh capaian indeks sebesar 79,75 point. Daerah tertinggi untuk dimensi Kepatuhan Membayar Zakat adalah Kabupaten Aceh Barat sebesar 85,33 point, sementara terendah berada di Kota Subulussalam sebesar 72,80 point. d. Dimensi Melek al-Qur'an memperoleh nilai indeks sebesar 82,28 point. Daerah tertinggi untuk dimensi melek Al-Quran adalah Kabupaten Bireuen sebesar 89,09 poin, sementara terendah berada di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 72,79 point. e. Dimensi Hukum Jinayat memperoleh capaian indeks sebesar 79,35 point. Daerah tertinggi untuk dimensi hukum jinayat adalah Kabupaten Aceh Selatan sebesar 84,65 point, sementara terendah berada di Kota Lhokseumawe sebesar 70,03 point. f. Dimensi Manajemen Masjid memperoleh capaian indeks sebesar 80,78 point. Daerah tertinggi untuk dimensi manajemen masjid adalah Kabupaten Aceh Selatan sebesar 85,91 poin, sementara terendah berada di Kota Sabang sebesar 75,04 point. g. Dimensi Akhlak memperoleh nilai indeks sebesar 88,06 point. Daerah tertinggi untuk dimensi akhlak adalah Kabupaten Pidie Jaya sebesar 92,53 poin, sementara terendah berada di Kota Sabang sebesar 79,09 point. <p>B. Rekomendasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim survei ips secara permanen dan inheren 2. Adanya sinergisitas dan linkage antara Dinas Syariat Islam, Bappeda Aceh dan Badan Pusat Statistik dalam penyediaan data informasi pembangunan Syariah 3. Menjadi role model pembangunan Aceh dalam penyusunan RPJM Aceh, sehingga indeks Pembangunan Syariah menjadi sasaran dan indikator capaian program pemerintah Aceh. 4. Mengoptimal tim survei Indeks Pembangunan Syariah tahun 2021 sebagai tim survei berikutnya untuk semakin mengokohkan prinsip-prinsip grand desain Indeks Pembangunan Syariah dimasa mendatang 5. Memperkuat sosialisasi indeks pembangunan Syariah di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sebagai key performance pelaksanaa Syariah Islam 	2021

